

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH EKONOMI MAKRO DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LUWU RAYA**

**SUKMAWAN**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH EKONOMI MAKRO DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LUWU RAYA**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SUKMAWAN**

**A11110009**



kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2014**

# SKRIPSI

## PENGARUH EKONOMI MAKRO DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LUWU RAYA

disusun dan diajukan oleh

**SUKMAWAN**  
**A111 10 0009**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Juli 2014

Pembimbing I



Dr.Hj.Indraswati Tri Abdi Reviane,SE.,MA  
NIP. 19651012 199903 2 001

Pembimbing II



Dr.Hj.Sri Undai Nurbayani,SE.,M.Si  
NIP. 19660811 199103 2 001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Drs.Muh.Yusri Zamhuri, MA., Ph.D  
NIP. 19610806 198903 1 004

# SKRIPSI

## PENGARUH EKONOMI MAKRO DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LUWU RAYA

disusun dan diajukan oleh

**SUKMAWAN**  
**A111 10 0009**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **20 Agustus 2014** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Indraswati Tri Abdi Revlane, SE.,MA.	Ketua	1.... 
2. Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si	Sekretaris	2.... 
3. Dr. H. Madris, DPS.,M.Si.	Anggota	3.... 
4. Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.	Anggota	4.... 
5. Dr. Hj. Nursini, SE., MA	Anggota	5.... 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Drs.Muh.Yusri Zamhuri, MA., Ph.D

NIP. 19610806 198903 1 004

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SUKMAWAN

NIM : A111 10 009

Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **PENGARUH EKONOMI MAKRO DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LUWU RAYA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dengan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

**SUKMAWAN**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat, Anugerah dan Perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ekonomi Makro Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DI Luwu Raya”** ini sesuai pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

- Kedua orang tua saya tercinta Andi Asmawati Adnan dan Syukur Pudaka, berkat doa, dukungnngan dan motivasi dari kalianlah sehingga saya bisa seperti sekarang,
- Bapak Drs.Muh.Yusri Zamhuri, MA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.
- Ibu Dr.Hj.Indraswati Tri Abdi Reviane,SE.,MA. selaku pembimbing I, yang tak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan, do'a, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama masa menempuh studi di Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Dr.Hj.Sri Undai Nurbayani,SE.,M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih atas pembelajaran selama tahun kuliah penulis.
- Pak Umar, Pak Parman, Pak Akbar, Pak Safar, Ibu Ida dan seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Unhas yang senantiasa memberi bantuan kepada penulis selama ini.
- Keluarga besar Andi Sibangareng (Opu Rellang, Adi Hadeyang, Nene Emma, Opu Mimi, Opu Ibu, Opu Awib, Opu Ida, Opu Mekka, Opu Ica)
- Keluarga besar di Palopo dan di Olang (Ibu Dila, Om Sahar, Opu Dewan dan keluarga, Opu Hedir dan keluarga, Opu Hendra dan keluarga, Opu abang dan keluarga) terima kasih atas dukungan dan doanya.
- Seluruh Keluarga besar **“Spultura 2010”**, Kak Kusumawardhani, Sri Wahyuni, Sri Fatmasari Syam, Indah Gita Cahyani, Amalia Nurul Alifa, Laura Virginia Sallolo, Dian Aziza JS., Muhammad Nakib Rabbani, Kevin Tjandra, Sukmawan, Liliyani, Herianto S., Surya Ariwirawan, Vina Tamaya, Restuti Anggereny Rumahorbo, Jennifer M A Parung, Tri Septia Nugraha, Eva Irwanti, Sulkifli Budiman, Muh. Ilham, La Caesar Muhammad Muttaqien, M. Rivqi Islan Amin, Muh. Ainul Yakin, Sri Raehana, Fatmawati, Rony Wijaya, Teguh Susilo Toni, Munawiruddin, Yeni Masni, Yudi Pratama, Ahmad Faqhruddin Abdu-Rabb, Fajariah, Yusri Pasolang, Yumni Wikarsih, M. Zaenal, Patotori, Muthya Nurfitriani R., Fuad Dwi Darmawan, Dede Darmanto, Sudirman Kahar, Monica Cahya Dini, Rifqa Latifadina, Ikram Sutanto, Ahmad Nurhanif, Ashar, Andi Tri Dharmanasatya, Muh. Nizar Ramadhan, Elvira Fransiska Arruan, Ayu Yustika, Salman Samir, dan Wahyudi Husain. Terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat serta kesabarannya selama kuliah hingga saat ini kepada penulis. Semoga gelar sarjananya cepat tercapai,

dan kita persembahkan serta amalkan ilmu yang kita dapat kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta agama.

- Keluarga besar SDN 55 Olang, SMPN 3 Palopo dan SMAN 4 Palopo
- Teman-teman angkatan 2010 jurusan Akutansi ( Titie Handayani, Malsi, Man, Awal, Noe, Syakir,Haidir, Yogo, Rahman, dan masih banyak lagi) serta teman-teman angkatan 2010 jurusan Manajemen yang telah menjadi bagian dari keluarga selama kuliah.
- Teman-teman KKN Gelombang 85 Kecamatan Walenrang (Desi, Meta, Arham, Afit, Akbar, Alm.Iman, Nuh, Tiwi, dll) yang telah memberikan banyak pengalaman baru selama KKN.
- Teman-teman ramsis (Nawir, Uya, Heri, Mito, Tio, Samiun) bersama kita jalani suka duka tinggal di ramsis selama kuliah.
- Sahabat, teman, dan pihak-pihak yang mungkin tak bisa disebutkan satu per satu. Namun kebaikan-kebaikan dari nama-nama yang tidak tertulis disini, insya Allah tetap dicatat oleh malaikat-malaikat-Nya. Terima kasih semuanya.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan makna positif bagi perkembangan Ilmu Ekonomi. Amin.

Makassar, 28 Agustus 2014

**SUKMAWAN**



## **ABSTRAK**

### **PENGARUH EKONOMI MAKRO DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LUWU RAYA**

### ***THE EFFECT OF MACRO ECONOMICS TO DISTRICT OWN SOURCE REVENUE IN LUWU RAYA***

**Sukmawan**

**Hj. Indraswati Tri Abdi Reviane**

**Hj. Sri Undai Nurbayani**

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah menggunakan time lag 1 tahun dan jumlah tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah melalui kabupaten/kota di Luwu Raya 2009-2012.

Penelitian ini juga menggunakan model analisis Regresi Linier Berganda dan menggunakan data panel yang menggabungkan antara analisis time series dan cross section. Dalam penelitian terdapat 3 kabupaten dan 1 kota yang diteliti di Luwu Raya yakni, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu Timur dan kota Palopo dari tahun 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah menggunakan time lag 1 tahun dan jumlah tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Luwu Raya.

**Kata Kunci:** *pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah.*

The objectives of this research is determine the impact of government expenditure, government expenditure using time lag 1 year and labor through economic growth to district own source revenue in Luwu Raya 2009-2012.

Result of this research using multiple linear regression model analysis and using panel data that combines time series and cross section analysis. This research There are 3 districts and 1 city studied In Luwu Raya between Luwu, Luwu Utara, Luwu Tmur and Palopo from 2009-2012. The results showed that during the study period of government expenditure variable, government expenditure used time lag 1 year and the labor through economic growth did not affect the district own source revenue in Luwu Raya 2009-2012

**Keywords :** *government expenditure, labor, government expenditure, district own source revenue*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 8
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	9
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah .....	12
2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	14
2.1.4 Tenaga Kerja .....	16
2.1.4.1 Teori Ketenagakerjaan.....	17
2.2 Hubungan Variabel .....	18
2.2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan PAD .....	18
2.2.2 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.2.3 Hubungan Antara Tenaga Kerja dengan PAD Dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.3 Study Empiris .....	21
2.4 Kerangka Pikir .....	22
2.5 Hipotesis .....	23
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 24
3.1 Lokasi Penelitian .....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	24
3.3.1 Metode Analisis .....	24
3.4 Pengujian Kriteria Statistik.....	27
3.4.1 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F).....	28
3.4.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....	28
3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	29
3.5 Definisi Operasional .....	30
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 31
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	31

4.2	Perkembangan Variabel Penelitian .....	34
4.2.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012 .....	34
4.2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012 .....	36
4.2.3	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012 .....	38
4.2.4	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Di Luwu Raya Tahun 2009-2012 .....	41
4.3	Analisis Data .....	42
4.4	Hasil Penelitian .....	43
4.4.1	Hasil Penelitian Model $Y_1$ .....	43
4.4.1.1	Penaksiran Model .....	43
4.4.1.2	Hasil Estimasi .....	44
4.4.1.3	Pengujian Hipotesis .....	45
4.4.1.4	Intrpretasi dan Pembahasan .....	46
4.4.1.4.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah t-1 dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	46
4.4.1.4.2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	47
4.4.1.4.3	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	47
4.4.1.4.4	Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	47
4.4.2	Hasil Penelitian Model $Y_2$ .....	48
4.4.2.1	Penaksiran Model .....	48
4.4.2.2	Hasil Estimasi .....	48
4.4.2.3	Pengujian Hipotesis .....	49
4.4.2.4	Intrpretasi dan Pembahasan .....	50
4.4.2.4.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	51
4.4.3	Pengaruh Ekonomi Makro Daerah Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	51
4.4.3.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	51
4.4.3.2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah( t-1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	53
4.4.3.3	Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	54
BAB V	PENUTUP .....	57
5.1	Kesimpulan .....	57
5.2	Saran .....	58
	DAFTAR PUSTAKA .....	60
	LAMPIRAN .....	63

## DAFTAR TABEL

### Tabel

Tabel 1.1	Perkembangan PAD di Luwu Raya Tahun 2009 .....	4
Tabel 4.1	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Di Luwu Raya 2009-2012 (Lag 1 Tahun) .....	40
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Statistik untuk $Y_1$ .....	44
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Statistik untuk $Y_2$ .....	49

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Luwu Raya 2009-2012 .....	35
Gambar 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Luwu Raya 2009-2012 .....	37
Gambar 4.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Luwu Raya 2009-2012 .....	39
Gambar 4.4 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Luwu Raya 2009-2012 .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

Lampiran 1	Data Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Luwu Raya 2009-2012 .....	68
Lampiran 2	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu 2009-2012 .....	69
Lampiran 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Mwnurut Lapangan Usaha 2000 di Kabupaten Luwu Utara 2009-2012 .....	70
Lampiran 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur 2009-2012 .....	67
Lampiran 5	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kota Palopo 2009-2012 .....	68
Lampiran 6	Hasil Pengujian Menggunakan Eviews 7.0 untuk Pengaruh $X_1$ , $X_{1(t-1)}$ dan $X_2$ terhadap $Y_1$ .....	69
Lampiran 7	Hasil Estimasi $Y_1$ ( $\hat{Y}_1$ ) Berdasarkan Cross/Wilayah.....	70
Lampiran 8	Hasil Pengujian Menggunakan Eviews 7.0 untuk Pengaruh $Y_1$ terhadap $Y_2$ .....	71
Lampiran 7	Riwayat Hidup .....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. (Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999).

Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan senantiasa didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah. Dalam era kebijakan otonomi daerah, desentralisasi memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Desentralisasi sendiri adalah suatu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004).

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu menangani urusan domestik, dengan itu diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat

strategis. Di lain pihak, daerah otonom akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan (Haris, 2005).

Dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah; Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berisi satu paket kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, (2) Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Selain itu Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, BPK, dan MA yang merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan perubahan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut mengharuskan tiap daerah untuk mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka memperdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, menuntut pemerintah daerah untuk semakin mampu mendanai aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan sendiri, artinya daerah diharapkan dapat mandiri, mempunyai keuangan daerah yang mantap sehingga daerah seharusnya tidak lagi terlalu menguntungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil lainnya, yang jumlahnya sangat terbatas bagi beberapa daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah otonom yang mandiri, perlu melihat lagi faktor-faktor seperti sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Faktor dana ini dapat dilakukan dengan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu diperlukan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Yulianto, 2006).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis, 1997).

Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan (Halim, 2001).

Variabel yang dapat dikendalikan yakni variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dan variabel ini tidak menyediakan data berupa angka-angka sehingga jika dipakai dalam sebuah penelitian tidak dapat diukur secara objektif pengaruhnya terhadap penerimaan PAD. Namun, variabel ini merupakan variabel pengontrol akan kesuksesan peningkatan PAD suatu daerah. Variabel-variabel ini antara lain :

(a) Kondisi awal suatu daerah; (b) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD; (c) Pengadaan pembangunan baru; (d) Mencari sumber pendapatan baru; (e) Perubahan peraturan; (f) Penyesuaian tarif. Selain variabel yang dapat dikendalikan, juga terdapat variabel yang tidak dapat dikendalikan. Untuk menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dinilai dengan memakai variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan yakni variabel-variabel makro ekonomi yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain seperti: (a). pengeluaran pemerintah (b) jumlah tenaga kerja; (c). Pertumbuhan ekonomi. Perbandingan PAD Kabupaten/Kota di Luwu Raya tahun 2009 dijelaskan oleh tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**PAD Kabupaten/Kota di Luwu Raya tahun 2009 (Rupiah)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PAD</b>
<b>Luwu</b>	19.337.923.976.,93
<b>Luwu Utara</b>	20.966.296.139,86
<b>Luwu Timur</b>	64.807.549.036,06
<b>Kota Palopo</b>	21.473.395.000,00

*Sumber : Kantor DPPKAD kabuapten/kota*

Data Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan PAD di Luwu Raya tahun 2009 dimana Kabupaten Luwu dengan total PAD terendah yakni sebesar Rp.19.337.923.976.,93, disusul Kabupaten Luwu Utara dengan total PAD sebesar Rp.20.966.296.139,86, Kemudian PAD Kota Palopo sebesar Rp. 21.473.395.000,00 dan Kabupaten Luwu Timur dengan total PAD tertinggi yakni sebesar Rp. 64.807.549.036,06.

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah di Luwu Raya akan lebih jelas jika melihat variabel makro seperti, pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu maka muncul pertanyaan bagaimanakah pengaruh ekonomi makro daerah yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sejauh mana respon perkembangan variabel makro terhadap penerimaan PAD di Luwu Raya. Sehingga penelitian ini diberi judul, **"Pengaruh Ekonomi Makro Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Luwu Raya"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini :

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya?
2. Apakah pengeluaran pemerintah dengan menggunakan time lag 1 tahun berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya

3. Apakah jumlah tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dengan menggunakan time lag 1 tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan tentang pengaruh kinerja ekonomi makro daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya.
2. Sebagai bahan pembading dan pelengkap bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembagunan ekonomi daerah khususnya peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Sebagai bahan informasi bagi pihak–pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan wawasan tentang ekonomi dan keuangan daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno, 1984).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (Datu, 2012) .

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga di kemukakan oleh HAW. Widjaja, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain (Widjaja, 2002).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya

yang menjadi sumber Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (Brahmantio, 2002).

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2004).

Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Todaro (2003), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

## 2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

## 3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

### 1. Produk Domestik Bruto (PDB)



Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Boediono (1992) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian itu, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri.

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

### 2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1994).

Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam; *Pertama*, pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 1994).

Menurut Putri (2009) anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik

yang paling mendasar antara pinjaman dari dalam dan luar negeri yaitu pada saat implikasi di saat pengembalian.

Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen atau lembaga negara non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap (Dumairy, 1997).

*Kedua*, pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu (Putri, 2011).

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk program pinjaman. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Basri, 2005).

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia

di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung Hankam, Telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan (Basri, 2005).

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat *exhaustive expenditure* yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu berupa pemindahan uang kepada individu – individu untuk kepentingan sosial. Jadi *exhaustive expenditure* mengalihkan faktor – faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa – jasa guru, militer, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya (Suparmoko, 1987).

### **2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X-M)$  yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas

kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. (Dumairy, 1997)

*Menurut Teori Peacock dan Wiseman* didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar

Menurut teori Rostow dan Musgrave, dimana mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional-relatif besar. Hal itu dikarenakan pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan.

Menurut Dorn busch dan fischer (1987) memperlihatkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi nasional yang lebih besar.

#### **2.1.4 Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002). Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari kerja (simanjuntak, 1985). Angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari kerja pada tingkat upah yang berlaku.

BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (*employed*) atas tiga macam. Pertama, tenaga kerja penuh (*full employed*) adalah tenaga kerja yang mempunyai jam kerja  $\geq 35$  jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*) yaitu tenaga kerja dengan jam kerja  $< 35$  jam dalam seminggu. Ketiga, tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), yaitu tenaga kerja dengan jam kerja  $0 \geq 1$  jam per minggu.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif kepada pembangunan ekonominya.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi adalah tenaga kerja.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah. (Kuncoro, 2004).

Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan ,melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

#### **2.1.4.1 Teori Ketenagakerjaan**

Ada beberapa teori penting yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan diantaranya adalah teori Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan merupakan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Kemudian menurut

teori Fei-Ranis (1961) yang berkaitan dengan negara berkembang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh; sumber daya alamnya belum dapat diolah; sebagian penduduknya bergerak di sektor pertanian; banyak pengangguran; dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, dimana pengangguran semu dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerjaan pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih dari upah institusional yang mereka peroleh dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, dimana tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih daripada perolehan upah konstitusional.

Sedangkan menurut Mankiw (1992), membedakan tenaga kerja (*labour*) menjadi dua yaitu tenaga kerja berpendidikan (*educated*) dan tidak berpendidikan (*uneducated*). Disini tenaga kerja berpendidikan (*educated labour*) diindikasikan dengan proporsi angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan lanjutan (*proportion of the labour force with secondary education*).

## **2.2 Hubungan Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan PAD**

Pendapatan asli daerah (PAD) dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PDRB. Hal ini sejalan dengan pendapat Bappenas (2003) yang



menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.2 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap PAD yaitu Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan pelayanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh salah satu ahli ekonomi Sukirno (1994) yaitu dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

### **2.2.3 Hubungan Antara Jumlah Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Semakin besar jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan di dalam perekonomian. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi peranannya dipengaruhi oleh keterampilan, tingkat pendidikan, dan daya kreasi yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Semakin tinggi tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan itu, maka akan cenderung meningkatkan produktivitasnya. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam bentuk meningkatnya output yang dihasilkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

## **2.3 Study Empiris**

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang

dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

Menurut Santosa dan Rahayu (2005) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa Variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Menurut Triani dan Yeni Kuntari (2010) dalam penelitiannya Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar , menyimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model yang di-ekpektasi-kan berpengaruh terhadap penerimaan PAD yaitu PDRB, jumlah penduduk, serta tingkat inflasi dan ternyata ketiganya memiliki nilai signifikan terhadap penerimaan PAD. Kondisi ini dibuktikan dengan hasil Uji bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen atau uji F yang menghasilkan nilai F sebesar 222,404 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 pada alfa 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut signifikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen-nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo (2011) dalam skripsinya dengan judul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Periode Tahun 1985 - 2009". yang menyatakan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

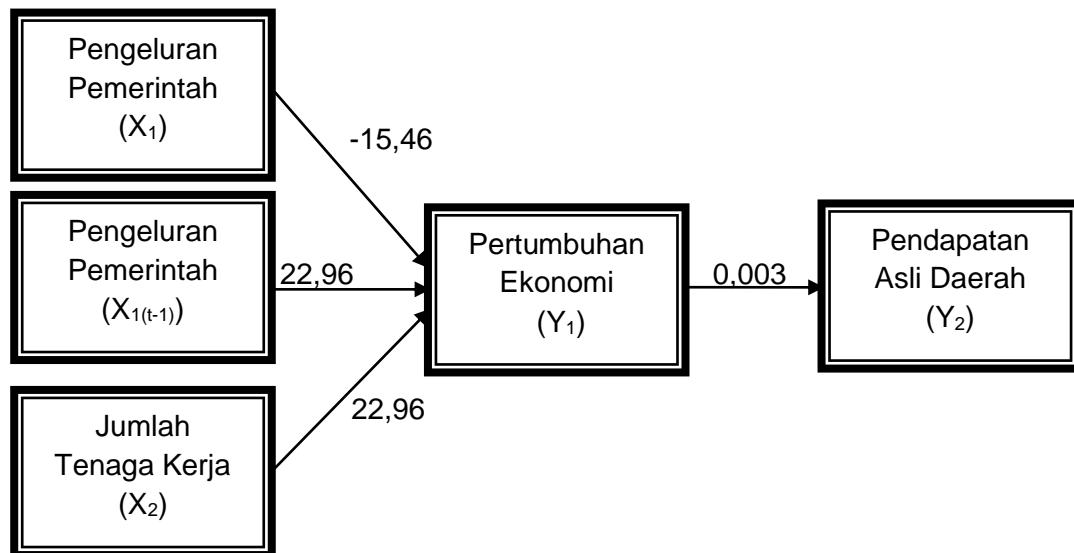
## **2.4 Kerangka Pikir**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur kemandirian keuangan suatu daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah maka akan semakin baik dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatnya pendapatan asli daerah. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana dari pada pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut.

Dari penjelasan tersebut muncul suatu kerangka konseptual yang harus dilakukan pengujian berkaitan dengan perkembangan variabel makro yaitu Pengeluaran Pemerintah, jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PAD.

**Gambar 2.1**  
**Gambar Kerangka Pikir**



## 2.5 Hipotesis

Dalam usaha pemecahan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat hipotesis diduga:

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya.
2. Diduga pengeluaran pemerintah dengan menggunakan time lag 1 tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya
3. Diduga jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan propinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Luwu Raya yang terdiri dari Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Data ini merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section* atau *Panel Pooled Data*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Luwu dalam angka, Luwu Utara dalam angka, Luwu Timur dalam angka dan Kota Palopo dalam angka, serta kantor/instansi yang berhubungan dengan penyediaan data penelitian, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara Penulis mengajukan surat izin penelitian kepada instansi-instansi yang terkait dengan penulisan ini dalam suatu wilayah penelitian, setelah diberikan izin penelitian dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan kemudian data tersebut akan diolah dan digunakan sebagai bahan analisis untuk membuktikan hipotesa yang telah dikemukakan.

##### **3.3.1 Metode Analisis**

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Luwu Raya, digunakan metode regresi berganda.

Metode regresi berganda adalah metode regresi yang melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan pengolahan data-data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode **Ordinary Least Square** (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat (Wagiono,1994).

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Parameter variabel independen akan diestimasi dengan menggunakan analisis data panel dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series*.

Persamaan (3.1) adalah bentuk model dasar untuk analisis empirik dengan menggunakan data panel untuk keperluan analisis dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka model estimasinya dituliskan sebagai berikut:

$$Y_1 = f(X_1, X_{1(t-1)}, X_2) \dots\dots\dots(3.1)$$

$$Y_2 = f(Y_1) \dots\dots\dots(3.2)$$

Persamaan fungsi pertumbuhan ekonomi ( $Y_t$ ) yang didapatkan dengan memasukkan unsur pengeluaran pemerintah ( $X_t$ ), pengeluaran pemerintah ( $t-1$ )

dan jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ), sehingga didapatkan persamaan logaritma non linear sebagai berikut:

$$e^{Y_1} = \alpha_0 X_1^{\alpha_1} X_{1(t-1)}^{\alpha_2} X_2^{\alpha_3} e^{\mu_1} \dots\dots\dots(3.3)$$

$$Y_2 = \beta_0 e^{\beta_1 Y_1 + \mu_2} \dots\dots\dots(3.4)$$

Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghazali, 2005) adalah sebagai berikut: (a) Menghindari adanya heteroskedastisitas, (b) Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas dan (c) Mendekatkan skala data.

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk semilog linear (*semi-log*). Dimana *semi-log* mempunyai beberapa keuntungan di antaranya (1) koefisien-koefisien model semilog mempunyai interpretasi yang sederhana, (2) model semilog sering mengurangi masalah statistic umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas, (3) model semilog mudah dihitung. Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$Y_{1it} = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{1i(t-1)} + \alpha_3 \ln X_{2it} + \mu_{1it} \dots\dots\dots(3.5)$$

$$\ln Y_{2it} = \ln \beta_0 + \beta_1 Y_{1it} + \mu_{2it} \dots\dots\dots(3.6)$$

Selanjutnya substitusi persamaaan 3.5 ke persamaan 3.6, sehingga didapatkan persamaan baru sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln Y_{2it} &= \ln \beta_0 + \beta_1 (\ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{1i(t-1)} + \alpha_3 \ln X_{2it} + \mu_{1it}) + \mu_{2it} \\ \ln Y_{2it} &= \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 \ln X_{1it} + \beta_1 \alpha_2 \ln X_{1i(t-1)} + \beta_1 \alpha_3 \ln X_{2it} + \beta_1 \mu_{1it} + \mu_{2it} \\ \ln Y_2 &= \sigma_0 + \sigma_1 \ln X_{1it} + \sigma_2 \ln X_{1i(t-1)} + \sigma_3 \ln X_{2it} + \mu_{3it} \dots\dots\dots (3.7) \end{aligned}$$

dimana :

$Y_1$  = Pertumbuhan ekonomi dalam satuan (%),

$Y_2$  = Pendapatan asli daerah dalam satuan rupiah,



$\alpha_0, \beta_0$  = Konstanta,

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$  = Koefisien Regresi,

$i$  = daerah

$t$  = Tahun

$t-1$  = Time Lag 1 tahun

$X_1$  = Pengeluaran pemerintah dalam satuan rupiah,

$X_{1(t-1)}$  = Pengeluaran pemerintah (t-1) dalam satuan rupiah,

$X_2$  = Jumlah Tenaga kerja dalam satuan jiwa,

$\mu$  = *Error term*.

$\sigma_0$  =  $\ln \beta_0 + \beta_1 \ln \alpha_0$

$\sigma_1$  =  $\beta_1 \alpha_1$

$\sigma_2$  =  $\beta_1 \alpha_2$

$\sigma_3$  =  $\beta_1 \alpha_3$

$\mu_{3it}$  =  $\beta_1 \mu_{1it} + \mu_{2it}$

### 3.4 Pengujian Kriteria Statistik

Gujarati (2003) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah  $H_0$  dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien determinasi *Goodness of fit test* ( $R^2$ ).

### 3.4.1 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F Tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$$

H<sub>1</sub>: minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2003).

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)} \quad \dots\dots\dots(3.8)$$

dimana:

K = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak apabila F hitung < F Tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima apabila F hitung > F Tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

### 3.4.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut:  $H_0: \beta_1 = 0$  tidak berpengaruh,  $H_1: \beta_1 > 0$  berpengaruh positif,  $H_1 : \beta_1 < 0$  berpengaruh negatif. Dimana  $\beta_1$  adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai  $\beta$  dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel  $X_1$  terhadap  $Y$ . Bila  $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima (signifikan) dan jika  $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$   $H_a$  ditolak (tidak signifikan). Uji  $t$  digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

### 3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Imam Ghazali (2005) menyatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) ada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* ( $R^2$ ) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

### 3.5 Definisi Operasional

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari hasil penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya dari tahun 2009-2012 dan dihitung dengan rupiah.

#### 2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya atas dasar harga konstan tahun 2000, dari tahun 2009-2012 dan dihitung dengan satuan persen.

#### 3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya dari tahun 2009 – 2012 yang diukur dengan rupiah.

#### 4. Pengeluaran Pemerintah time lag 1 tahun

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan time lag 1 tahun atau data mundur 1 tahun yang ada di Luwu Raya dari tahun 2008 – 2011 yang diukur dengan rupiah.

#### 5. Jumlah Tenaga kerja

Jumlah Tenaga kerja adalah jumlah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun dan sedang memiliki pekerjaan di kabupaten/kota yang ada di Luwu Raya dari tahun 2009-2012 dan dihitung dalam satuan jiwa.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Luwu Raya merupakan bagian dari propinsi di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota, antara lain:

##### **a) Kabupaten Luwu**

Kabupaten Luwu terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, dimana posisi Kabupaten Luwu terletak 2°.34'.45" – 3°.30'.30" LS dan 120°21'.15" – 121°43'.11" BT. Secara administratif, Kabupaten Luwu memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kota Palopo dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap.

Kabupaten Luwu terbagi atas 22 wilayah kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan dimana Ibukota Kabupaten adalah Kota Belopa (terdiri dari Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara). Kecamatan Latimojong merupakan kecamatan yang terluas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 Km<sup>2</sup> atau 15,59%. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas yang paling kecil adalah Kecamatan Lamasi dengan luas 42,2 Km<sup>2</sup> atau 1,41 %.

##### **b) Kabupaten Luwu Utara**

Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibu kota

Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 01° 53' 019" - 02° 55' 36" Lintang Selatan (LS) dan 119° 47' 46" - 120° 37' 44" Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Luwu & Teluk Bone
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Prov. Sulawesi Barat
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Luwu Timur

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar 7.843,57 Km<sup>2</sup> terbagi dalam 12 kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan yang terdiri dari 4 kelurahan dan 169 desa. Dan terdapat 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Dan sungai terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang 108 Km. Serta curah hujan beragam rata-rata selama tahun 2010.

Diantara 12 Kecamatan, Kecamatan seko merupakan Kecamatan yang terluas dengan luas 2.109,19 Km<sup>2</sup> atau 28,11 % dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang terletak paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara , yakni berjarak 198 Km. Urutan kedua adalah Kecamatan Rampi dengan luas 1.565,65 Km<sup>2</sup> atau 20,87 % dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas wilayah 93,75Km<sup>2</sup> atau 1,25 % dan pada tahun 2012 di bentuk satu kecamatan baru.

### **c) Kabupaten Luwu Timur**

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003.

Kabupaten Luwu Timur terletak antara antara 2° 03' 00" - 3 ° 03' 25" LS dan 119° 28' 56" - 121 ° 47' 27" BT. Luas wilayah seluruhnya adalah 6.944,88 km<sup>2</sup> dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 11 kecamatan, 99 Desa/Kelurahan. Adapun batas- batas wilayahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Marowali Propinsi Sulawesi Tengah,

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kendari dan Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km<sup>2</sup> atau sekitar 10,82 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada diketinggian 0 – 1.230 m diatas permukaan laut (dpl). Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yag cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

#### **d) Kota Palopo**

Secara geografis Kota Palopo terletak pada koordinat 20530150 - 30040080 Lintang Selatan dan 1200030100 - 1200140340 Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 247,52 Km<sup>2</sup>, atau sekitar 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja

Kondisi geografis Kota Palopo merupakan dataran rendah dengan bentangan daerah pesisir pantai kurang lebih 20 Km, sekitar 62,4% dari luas wilayah Kota Palopo adalah merupakan daerah dengan ketinggian antara 0-500m dari permukaan laut, 24,76%

Kepadatan penduduk pada tahun 2006 mencapai 541 jiwa/km, yang tersebar ke dalam 9 (sembilan) Kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) Kelurahan. Distribusi tingkat kepadatan penduduk tidak merata dimana terdapat tiga Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas 1.000 jiwa /km<sup>2</sup>, yaitu Kecamatan Wara dengan tingkat kepadatan tertinggi 1.967 jiwa / km<sup>2</sup>, Kecamatan Wara Timur dengan kepadatan 1.931 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan wara Utara dengan kepadatan 1.607 jiwa/km. Terdapat 2 (dua) Kecamatan dengan tingkat kepadatan sedang yakni Kecamatan Wara Selatan dengan tingkat kepadatan 973 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bara dengan kepadatan 871 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan 4 (empat) Kecamatan lainnya memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah yakni Kecamatan Telluwana dengan kepadatan 392 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Sendana dengan kepadatan 207 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Wara Barat dengan kepadatan 178 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Mungkajang dengan kepadatan 173 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **4.2 Perkembangan Variabel Penelitian**

### **4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Luwu raya Tahun 2009-2012**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi

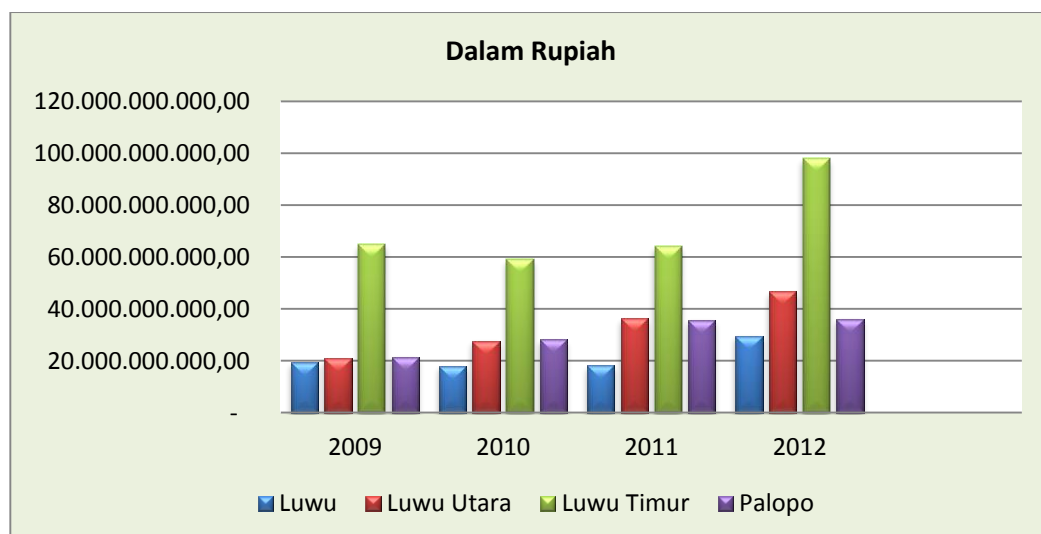


yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo (2000) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Berikut adalah gambar perkembangan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012.

**Gambar 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012**



Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten/Kota

Gambar 4.1, menggambarkan perkembangan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Luwu Raya tahun 2009-2012, dimana selama kurung waktu tersebut pendapatan asli daerah di kabupaten/kota sebagian besar menunjukkan trend peningkatan meskipun peningkatan masih relatif kecil di beberapa daerah, kecuali kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ketahun kecuali tahun 2010 yang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2009 sebesar Rp64.807.549.036,00 menjadi Rp59.143.942.602,28 pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 kembali menunjukkan peningkatan sebesar Rp64.107.149.333,16 begitupun dengan tahun 2012 yang juga mengalami peningkatan yang jauh lebih besar yakni sebesar Rp98.100.075.156,43.

Berbeda dengan Kabupaten Luwu yang memiliki pendapatan asli daerah terendah dibanding dengan daerah lainnya, pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu menunjukkan trend yang tidak stabil, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp17.930.679.544,81 dari tahun 2009 sebesar Rp19.337.923.976,93 dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat kecil pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp18.318.366.436,00, tetapi tahun 2012 menunjukkan peningkatan yang cukup baik sekaligus sebagai peningkatan yang tertinggi dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp29.583.619.059,36. Sementara itu Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo mengalami peningkatan pendapatan asli daerah tiap tahunnya selama tahun 2009-2012.

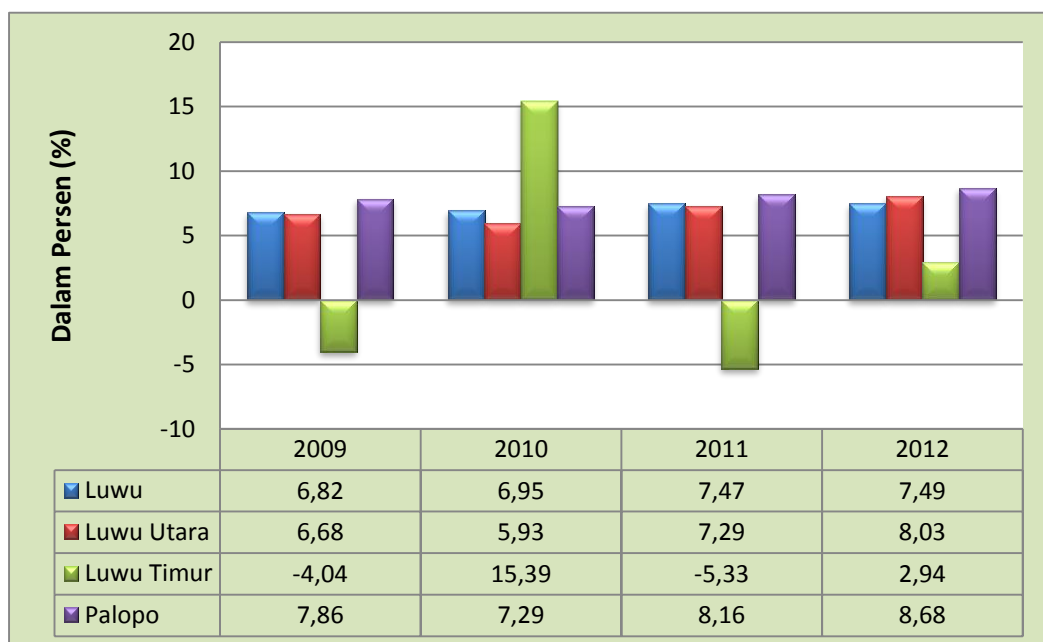
#### **4.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Luwu raya Tahun 2009-2012**

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat daerah pada suatu waktu tertentu dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Dalam artian bahwa

semakin maju perekonomian suatu daerah, maka kesejahteraannya akan meningkat juga. Meskipun dalam kondisi ini perlu mendapat kajian yang lebih mendalam lagi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibanding dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Luwu Raya, terdapat pada gambar berikut ini.

**Gambar 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012 Atas Dasar Harga Konstan**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.2, menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Luwu Raya tahun 2009-2012, dimana kurun waktu tersebut menunjukkan

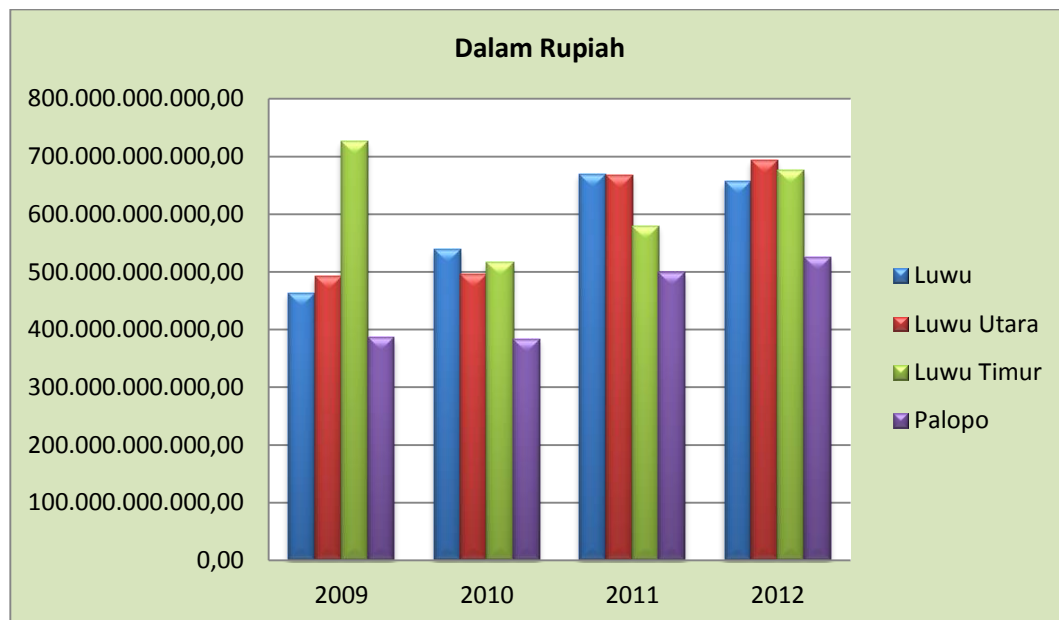
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, sebagian besar menunjukkan trend peningkatan di beberapa tahun meskipun peningkatan masih relatif kecil, kecuali Kabupaten Luwu Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kurang baik yang ditandai dengan pertumbuhan yang menurun pada tahun 2009 sebesar -0,04% dan tahun 2011 sebesar -5,33%. Sementara itu Kota Palopo menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik walaupun mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 7,29% tetapi kemudian mengalami peningkatan ditahun tahun berikutnya sekaligus Kota Palopo sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi di Luwu Raya.

#### **4.2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012**

Pengeluaran Pemerintah daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. Disisi lain anggaran dapat pula menjadi saran bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pembahasan sebelumnya memperlihatkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi nasional yang lebih besar, artinya semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat sejauh mana perkembangan pengeluaran pemerintah untuk masing-masing daerah di Luwu Raya dapat dilihat pada gambar 4.3.

**Gambar 4.3, Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di  
Luwu Raya Tahun 2009-2012**



*Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten/Kota*

Pada Gambar 4.3, dimana realisasi pengeluaran pemerintah tahun 2009-2012 rata-rata daerah menunjukkan perkembangan yang masih mengalami fluktuatif. Tetapi tidak pada Kabupaten Luwu Utara yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2009 sebesar Rp492.273.000.000,00, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2010 yakni menjadi Rp496.175.340.000,00. Selanjutnya angka pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan yang sedikit besar Rp667.998.613.239,46, ditahun berikutnya yakni tahun 2012 kembali mengalami peningkatan yang kecil menjadi Rp693.210.130.000,00. Sementara itu Kabupaten Luwu Timur yang memiliki jumlah terbesar pada tahun 2009 yakni sebesar Rp725.998.675.865,00, mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2010 menjadi Rp516.006.469.440,00, tetapi tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan yang cukup baik.

Hal perlu diperhatikan dalam perekonomian adalah jarang terdapat reaksi yang ditimbulkan oleh suatu aksi secara seketika. Namun, hal ini memerlukan selang waktu atau *time lag* (kelambanan) (Gujarati2003). Realisasi pengeluaran pemerintah tidak dapat langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ditahun yang sama. Maka untuk melihat efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi dibutuhkan adanya “time lag”.

Maka pada penelitian ini menggunakan time lag data yang digunakan mundur 1 tahun (tahun sebelumnya). Jadi data untuk tahun 2008 digunakan untuk tahun 2009 dan seterusnya, sehingga diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4.1, Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012 (Lag 1 tahun)**

TAHUN	KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PEMERINTAH (t-1)
2008	LUWU	
2009	LUWU	473.355.090.930,50
2010	LUWU	463.240.183.542,00
2011	LUWU	538.923.160.739,00
2012	LUWU	669.738.417.294,00
2009	LUWU UTARA	442.333.000.000,00
2010	LUWU UTARA	492.273.000.000,00
2011	LUWU UTARA	496.175.340.000,00
2012	LUWU UTARA	667.998.613.239,46
2009	LUWU TIMUR	563.672.762.327,00
2010	LUWU TIMUR	725.998.675.865,00
2011	LUWU TIMUR	516.006.469.440,00
2012	LUWU TIMUR	579.555.754.672,00
2009	PALOPO	359.254.921.921,51
2010	PALOPO	386.056.041.480,00
2011	PALOPO	383.663.586.120,00
2012	PALOPO	498.403.458.000,00

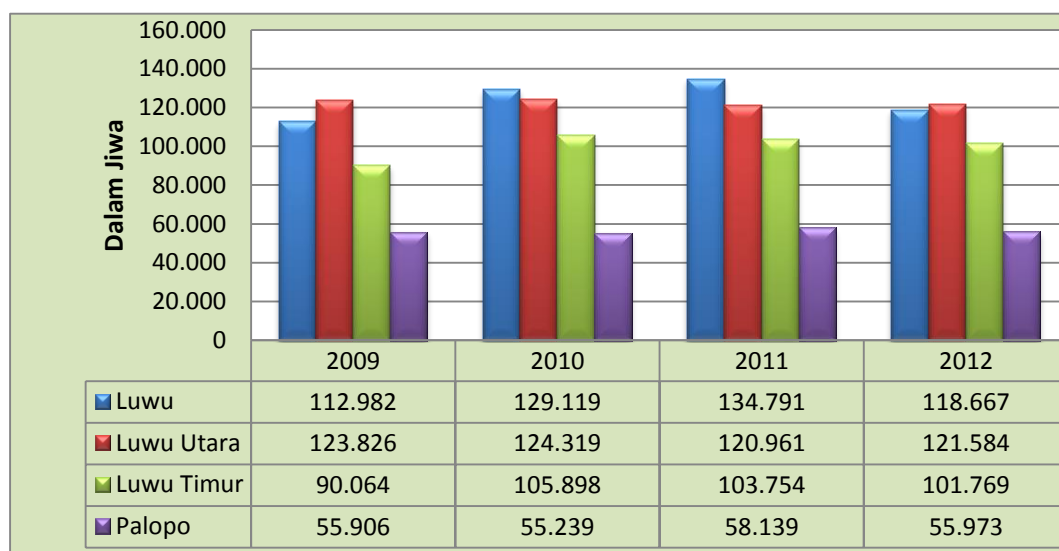
Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten/Kota

#### 4.2.4 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Luwu raya Tahun 2009-2012

Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah merupakan faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang bekerja maka tenaga kerja tersebut semakin produktif yang pada akhirnya bisa meningkatkan output daerah.

Berdasarkan hasil survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), yang dilakukan di propinsi Sulawesi Selatan tercatat penduduk yang berada di kabupaten/kota yang termasuk angkatan kerja dan sedang bekerja periode tahun 2009-2012 cenderung mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada gambar 4.4.

**Gambar 4.4, Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Luwu Raya Tahun 2009-2012**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 4.4, menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam kategori bekerja pada setiap daerah mengalami fluktuatif. Jumlah rata-rata tenaga kerja di daerah menunjukkan trend yang kurang baik, peningkatan tenaga kerja tiap tahun tidak mengalami penambahan tenaga kerja yang cukup signifikan. Berapapun daerah justru mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Kabupaten Luwu yang cenderung memiliki tenaga kerja terbanyak pada tahun 2009 sampai 2010 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan jumlah tenaga kerja 112.982 jiwa (2009) dan 139.791 jiwa (2011) tetapi mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 118.667 jiwa. Sementara itu Kota Palopo yang memiliki tenaga kerja terendah dibanding daerah lainnya tercatat pada tahun 2009 sebesar 55.906 jiwa mengalami penurunan menjadi 55.239 jiwa di tahun 2010, kemudian meningkat cukup baik di tahun 2011 menjadi 58.139 jiwa tetapi kembali mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 55.973.

#### **4.3 Analisis Data**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *ekonometrika* dengan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan data panel selama periode 2009-2012 dengan metode *Panel Least Square (PLS)*. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 7.0 yang membantu dalam pengujian model hipotesis secara parsial maupun bersama-sama.



## 4.4 Hasil Penelitian

### 4.4.1 Hasil Penelitian Model $Y_1$

#### 4.4.1.1 Penaksiran Model

Analisis regresi digunakan untuk mengestimasi apakah pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah (t-1) dan jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya tahun 2009 – 2012 maka terlebih dahulu dilakukan uji penaksiran model, pengujian yang dilakukan meliputi :

##### 1. ***Common Effect Model dan Fixed Effect Model***

Untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan, maka digunakan uji F-Restricted dengan membandingkan F-statistik dan F-tabel terlebih dahulu dibuat hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Model PLS (Restricted)

$H_1$  : Model FEM (Unrestricted)

Dari Hasil Regresi Berdasarkan metode fixed Effect dan Pooled Least Square menggunakan uji chou diperoleh nilai F-statistik adalah 4,23 dengan nilai tabel pada df (3,9)  $\alpha = 0,05$  adalah 3,86, sehingga F-statistik > F-tabel, maka  $H_0$  ditolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

##### 2. ***Fixed Effect Model dan Random Effect Model***

Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah fixed effect model, model data panel masih harus dibandingkan lagi antara Fixed Model Effect dengan Random Effect.

Dari Hasil Regresi diperoleh hasil pengujian Housman untuk Random Effect dengan Fixed Effect diperoleh Probabilitas Cross section random sebesar 0,0053 dimana  $\alpha = 0,05$  lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dapat digunakan adalah Fixed Effect Model.

#### 4.4.1.2 Hasil Estimasi

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ), pengeluaran pemerintah ( $X_{1(t-1)}$ ) dan jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) di kabupaten/kota Luwu Raya tahun 2009-2012 maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program Eviews 7.0 pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**

#### Hasil Estimasi Melalui Model Pooled Least Square

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-516.1520	275.6924	-1.872203	0.0940
X1	-15.46469	6.521235	-2.371436	0.0418
X1(t-1)	22.96582	6.957790	3.300734	0.0092
X2	28.01103	17.61329	1.590335	0.1462
LUWU	-6.325807			
LUWU UTARA	-5.673645			
LUWU TIMUR	-6.766578			
PALOPO	18.76603			
R-squared	0.710235			
Adjusted R-squared	0.517058			
F-statistic	3.676602			
Prob(F-statistic)	0.039614			

Sumber : Data Sekunder yang diolah dari Eviews 7.

Hasil regresi pada tabel 4.2, pengaruh variabel pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ), pengeluaran pemerintah ( $X_{1(t-1)}$ ), dan jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) di Luwu Raya tahun 2009 - 2012 adalah:

$$\hat{Y}_{1it} = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{1i(t-1)} + \alpha_3 \ln X_{2it} + \mu_{1it}$$

$$\hat{Y}_{1it} = -516.1520 - 15.46469 \ln X_{1it} + 22.96582 \ln X_{1i(t-1)} + 28.01103 \ln X_{2it}$$

$$\hat{Y}_{1it(L)} = -6.325807 - 15.46469 \ln X_{1it} + 22.96582 \ln X_{1i(t-1)} + 28.01103 \ln X_{2it}$$

$$\hat{Y}_{1it(LU)} = -5.673645 - 15.46469 \ln X_{1it} + 22.96582 \ln X_{1i(t-1)} + 28.01103 \ln X_{2it}$$

$$\hat{Y}_{1it(LT)} = -6.766578 - 15.46469 \ln X_{1it} + 22.96582 \ln X_{1i(t-1)} + 28.01103 \ln X_{2it}$$

$$\hat{Y}_{1it(P)} = 18.76603 - 15.46469 \ln X_{1it} + 22.96582 \ln X_{1i(t-1)} + 28.01103 \ln X_{2it} + \mu_{1it}$$

#### 4.4.1.3 Pengujian Hipotesis

Dari hasil regresi pada tabel 4.2, pengaruh variabel pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ), pengeluaran pemerintah ( $X_{1(t-1)}$ ), dan jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) diperoleh dengan nilai sebesar  $R^2$  0.710235. Hal ini berarti variabel-variabel independen (bebas) yaitu, pengeluaran pemerintah ( $X_{1t}$ ), pengeluaran pemerintah ( $X_{1(t-1)}$ ) dan jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ) menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) di kabupaten/kota Luwu Raya sebesar 71%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 29%.

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen didalam model dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh pengeluaran pemerintah ( $X_{1t}$ ), pengeluaran pemerintah ( $X_{1(t-1)}$ ) dan jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) kabupaten/kota di Luwu Raya dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ( $\alpha = 0,5$ ), dari regresi pada Tabel 4.2 diperoleh Prob(F-statistic) sebesar 0,03, Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi pada Tabel 4.2 adalah fit.

Uji signifikasi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikasi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t-statistik lebih > nilai t-tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari alpha ( $\alpha$ ) 1%, 5%, atau 10%. Pengaruh pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ), pengeluaran pemerintah ( $X_{1(t-1)}$ ) dan jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) kabupaten/kota di Luwu Raya dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dan degree of freedom ( $df = n-k = 16-4 = 12$ ) diperoleh t-tabel sebesar 1,782. Dari Tabel 4.2 di atas, dapat diinterpretasikan

bahwa secara individu dan jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ) tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ), sedangkan pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ) dan pengeluaran pemerintah ( $X_{1(t-1)}$ ) signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ).

#### **4.4.1.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan**

##### **4.4.1.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah (t-1) dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan Tabel 4.4 dengan melihat masing-masing koefisien regresi kabupaten/kota di Luwu Raya didapatkan bahwa untuk Kabupaten Luwu sebesar -6,32, Kabupaten Luwu Utara sebesar -5,67, Kabupaten Luwu Timur -6,76 dan Kota Palopo sebesar 18,76. Untuk Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur menunjukkan angka koefisien hampir sama sedangkan Palopo menunjukkan perbedaan yang cukup menonjol. Adanya perbedaan yang terjadi ini disebabkan karena adanya pemekaran wilayah yang masih tergolong baru. Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur adalah kabupaten yang berasal dari pemekaran, daerah dengan hasil pemekaran seperti ini umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan dianggap baru memulai untuk mandiri membangun daerahnya.

Berbeda dengan Kota Palopo yang menunjukkan angka positif dan cukup besar pada koefisiennya. Kota Palopo yang awalnya bergabung dengan Kabupaten Luwu dan merupakan ibu kota Kabupaten Luwu memisahkan diri dan membentuk kota madya. Kota yang umumnya adalah merupakan daerah dimana pusat perdagangan, tenaga kerja yang besar, Industri, fasilitas publik yang memadai dan baik, investasi yang besar dan sebagainya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik bahkan tinggi. Kota juga merupakan pusat perekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten. Hal ini sama dengan Palopo yang merupakan sebuah kota yang sudah ada jauh sebelumnya sehingga bisa disebut

kota yang sudah mandiri sejak lama, sehingga wajar Kota Palopo menunjukkan koefisien yang positif dan besar.

#### **4.4.1.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Luwu Raya. Hal ini terlihat pada Tabel 4.4 yang menunjukkan nilai probabilitasnya kurang dari 5% (0,05) yaitu 0,04

#### **4.4.1.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (t-1) atau dengan menggunakan data time lag 1 tahun secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Luwu Raya. Hal ini terlihat pada Tabel 4.4 yang menunjukkan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0092 (kurang dari 5%) dan nilai koefisien  $X_{1t-1}$  menunjukkan angka 22.96, artinya setiap kenaikan sebesar 1% pengeluaran pemerintah maka akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 22.96%. Sebaliknya apabila pengeluaran pemerintah turun sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 22.96%.

#### **4.4.1.4.4 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Luwu Raya. Hal ini terlihat pada Tabel 4.4 nilai probabilitasnya lebih dari 5% (0,05) yaitu 0.1462. Variabel tenaga kerja tidak sesuai dengan

hipotesis penelitian bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Luwu Raya.

#### **4.4.2 Hasil Penelitian Model $Y_2$**

##### **4.4.2.1 Penaksiran Model**

###### **1. *Common Effect Model dan Fixed Effect Model***

Dari Hasil Regresi Berdasarkan metode fixed Effect dan Pooled Least Square dengan menggunakan uji chou diperoleh nilai F-statistik adalah 10,08 dengan nilai tabel pada df (3,11)  $\alpha = 0,05$  adalah 3,59, sehingga F-statistik > F-tabel, maka  $H_0$  ditolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

###### **2. *Fixed Effect Model dan Random Effect Model***

Dari Hasil Regresi diperoleh hasil pengujian Housman untuk Random Effect dengan Fixed Effect diperoleh Probabilitas Cross section random sebesar 0,0034 dimana  $\alpha = 0,05$  lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dapat digunakan adalah Fixed Effect Model.

##### **4.4.2.2 Hasil Estimasi**

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ) di kabupaten/kota Luwu Raya tahun 2009-2012 maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program Eviews 7.0 pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Estimasi Melalui Model Pooled Least Square**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.66104	11.18038	2.026857	0.0676
Y1	0.003052	0.021408	0.142589	0.8892
LUWU	-0.499320			
LUWU UTARA	-0.085091			
LUWU TIMUR	0.729325			
PALOPO	-0.144913			
R-squared	0.785279			
Adjusted R-squared	0.707199			
F-statistic	10.05731			
Prob(F-statistic)	0.001125			

*Sumber : Data Sekunder yang diolah dari Eviews 7.*

Hasil regresi pada tabel 4.3 pengaruh pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah di Luwu Raya tahun 2009 - 2012 adalah:

$$\begin{aligned} \ln \hat{Y}_{2it} &= \ln \beta_0 + \beta_1 Y_{1it} \\ \ln \hat{Y}_{2it} &= 22.66104 + 0.003052 Y_{1it} \\ \ln \hat{Y}_{2it(L)} &= -0.499320 + 0.003052 Y_{1it} \\ \ln \hat{Y}_{2it(LU)} &= -0.085091 + 0.003052 Y_{1it} \\ \ln \hat{Y}_{2it(LT)} &= 0.729325 + 0.003052 Y_{1it} \\ \ln \hat{Y}_{2it(P)} &= -0.144913 + 0.003052 Y_{1it} \end{aligned}$$

#### 4.4.2.3 Pengujian Hipotesis

Dari hasil regresi pada tabel 4.3, pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ) diperoleh dengan nilai sebesar  $R^2$  0,78 Hal ini berarti variabel-variabel independen (bebas) yaitu pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) menjelaskan variasi pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ) di kabupaten/kota Luwu Raya sebesar 78%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 22%.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Luwu Raya dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) degree of freedom ( $df_1 = k-1 = 2-1 = 1$ ) dan ( $df_2 = n-k = 16-2 = 14$ ) diperoleh F-tabel sebesar 4,6. Dari regresi pada Tabel 4.3 Prob(F-statistic) sebesar 0.001, Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi pada Tabel 4.3 adalah fit.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Luwu Raya dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dan degree of freedom ( $df = n-k = 16-2 = 14$ ) diperoleh t-tabel sebesar 1,761. Dari hasil regresi tabel 4.7 diperoleh t-statistik sebesar 0,14, maka t-statistik < t-tabel ( $0,14 < 1,761$ ). Jadi dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ), tidak signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ).

#### 4.4.2.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.3 didapatkan hasil koefisien regresi untuk masing-masing kabupaten/kota. Untuk koefisien regresi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo yakni masing-masing sebesar (-0,49, -0,08 dan -0,14) menunjukkan nilai yang negatif.

Hasil lain ditunjukkan oleh Kabupaten Luwu Timur dimana nilai koefisien regresinya sebesar 0,73 dan bernilai positif. Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah yang mempunyai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pertambangan yang cukup besar. Luwu Timur mempunyai pertambangan nikel yang cukup besar sebagai aset terbesar penyumbang pendapatan asli daerah. Ketika Luwu Timur mengalami masalah dalam pertumbuhan ekonominya, hal ini tidak akan langsung berdampak cukup besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerahnya. Berbeda dengan Luwu, Luwu Utara dan Palopo yang umumnya tidak mempunyai hasil pertambangan yang



cukup besar, ketika mengalami masalah dengan pertumbuhan ekonomi, kemungkinan akan langsung berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah sebab tidak ada sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar untuk mengcovernya.

#### **4.4.2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Luwu Raya. Hal ini terlihat pada Tabel 4.3 yang menunjukkan nilai t-statistik (0,14) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,761) atau nilai probabilitasnya lebih dari 5% (0,05) yaitu 0,8892.

#### **4.4.3 Pengaruh Ekonomi Makro Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

##### **4.4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil estimasi pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan didapatkan hasil koefisien regresi sebesar -0,046, sehingga disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi.

Untuk Pengeluaran pemerintah yang dilakukan lebih cenderung untuk pengeluaran disektor yang produktif yang langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi dengan melihat hasil yang ada pengaruh yang dihasilkan tidak terlalu cukup besar. Untuk dapat merasakan pengaruh yang

cukup besar memang memerlukan waktu beberapa tahun kemudian sehingga dapat terjadi.

Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk menyediakan infrastruktur seperti saran jalan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi disektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pengeluaran pemerintah tetap diperlukan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di kabupaten/kota Luwu Raya ini bahwa pengeluaran pemerintah tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara cepat tetapi memerlukan proses dan waktu yang berjangka agar dapat berpengaruh maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Melihat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Luwu Raya justru tidak berdampak pada pendapatan asli daerah, Barata (2004) mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Sementara itu Saragih (2003) menyatakan peningkatan pendapatan daerah mempunyai eksess dari pertumbuhan ekonomi.

Namun, dalam penelitian ini menemukan hasil yang lain bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah tidak sejalan dengan teori yang ada. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal sebagai

cerminan dari kesungguhan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah untuk mewujudkan otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan keuangan daerah.

Kebijakan untuk setiap komponen pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap sumber dana. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Luwu Raya dapat dilihat dari sisi potensi pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan daerah yang masih belum optimal dikarenakan sejumlah kendala antara lain; belum terdatanya semua objek dan wajib pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dan yang terpenting adalah masih kurangnya upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah.

#### **4.4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil estimasi pengeluaran pemerintah (t-1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan didapatkan hasil koefisien regresi sebesar 0,068, sehingga disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah (t-1) tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah (t-1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perbandingan dengan pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ) dengan pengeluaran pemerintah ( $X_{1(t-1)}$ ) atau dengan menggunakan time lag didapatkan

bahwa pengaruhnya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi akan terjadi setelah adanya selang waktu kemudian.

Pengeluaran pemerintah yang dilakukan di Luwu Raya menunjukkan hasil yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran yang dilakukan pemerintah lebih banyak dilakukan pada sektor yang produktif, seperti pengeluaran pada sektor pembangunan/modal, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu jumlah pengeluaran pemerintah yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Luwu Raya rata-rata mengalami peningkatan yang cukup besar tiap tahunnya, sehingga semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan maka akan terus berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X-M)$  yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional.

Dorn busch dan fischer (1987) memperlihatkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi nasional yang lebih besar. Tetapi dengan pengaruh pengeluaran pemerintah yang baik tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah apabila tidak ada upaya dari pemerintah untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah.

#### **4.4.3.3 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil estimasi jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah dan didapatkan hasil koefisien regresi sebesar 0,084, sehingga disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Luwu. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya menunjukkan trend yang cukup baik dimana rata-rata daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya, tetapi kondisi lain terjadi pada jumlah tenaga kerja yang ada, dimana rata-rata daerah mengalami perkembangan peningkatan jumlah tenaga kerja yang kurang baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tetap harus didukung dengan ketersediaan tenaga tenaga kerja baik itu tenaga ahli maupun tenaga kasar (buruh). Kurangnya ketersediaan lapangan kerja ditambah dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan penyebab tidak berpengaruhnya jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya.

(Kuncoro, 2004) Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah.

Selain itu faktor penyebab lain adalah jumlah tenaga kerja dengan produktifitas dan kualitas yang rendah merupakan salah satu penghambat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Luwu Raya.

Berdasarkan data distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2008-2012, rata-rata di Luwu Raya lapangan usaha yang paling mendominasi adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak, tetapi melihat kondisi yang ada setiap tahunnya ketersediaan lahan yang terus berkurang ditambah peningkatan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat merupakan masalah baru. Hal ini akan menyebabkan kelebihan lain tetapi dengan kualitas yang rendah terpaksa harus bekerja pada sektor pertanian karena tidak adanya pilihan lain.

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan diatas dan kurang upayanya pemerintah dalam melakukan optimalisasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah merupakan penyebab tidak berpengaruhnya jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan.  
Pengeluaran pemerintah yang dilakukan pada tahun yang sama cenderung tidak akan menimbulkan pengaruh secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Luwu Raya..
- b. Pengeluaran pemerintah dengan menggunakan time lag 1 tahun berpengaruh positif dan signifikan. Pengeluaran pemerintah baru akan terasa pengaruhnya secara besar terhadap pertumbuhan ekonomi setelah selang beberapa waktu kemudian.
- c. Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan. Jumlah tenaga kerja dengan produktivitas yang rendah tidak akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Luwu Raya.
- d. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan.  
Pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpengaruh meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi pertumbuhan ekonomi yang positif bisa tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah apabila tidak ada upaya yang maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari pemerintah maupun masyarakat.

## 5.2 Saran

Adapun saran untuk hasil penelitian ini adalah:

- a. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Luwu Raya, pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya sektor yang lebih produktif, Pemerintah juga harus sungguh-sungguh dalam mengambil kebijakan serta melakukan pengawasan, khususnya di bidang pengeluaran pemerintah
- b. Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi penggunaan tenaga kerja harus pada sektor yang produktif. Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang baik dan produktif, oleh karena pemerintah harusnya aktif penuh dalam mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, menghasilkan lapangan kerja baru sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif.
- c. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah dan masyarakat harus berperan dalam peningkatan ini. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan upaya dalam melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, banyak cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk ini, antara lain menemukan sumber PAD baru, mengoptimalkan sumber PAD yang sudah ada, melakukan pengaturan retribusi yang dianggap masih kurang, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta memperbaiki kinerja BUMD yang dianggap masih rendah. Untuk masyarakat sendiri harus memulai sadar dari diri sendiri akan peran



pajak dalam pembangunan, dengan membayar pajak akan mendorong perekonomian daerah dan manfaatnya akan kembali kemasyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. CV Duta Nusindo, Semarang.
- Aryanti, Eni dan Indarti, lin. 2010. *Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala, Semarang.
- Atep Adya Barata 2004. *Pendapatan asli daerah*. Terjemahkan Barata, jakarta.
- Azis, 1997. *Pendapatan Asli Daerah*. Erlangga, Jakarta
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Rajawali Press, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4, Jakarta.
- Boediono, 1992. *Ekonomi Makro*, BPEF UGM, Yogyakarta.
- BPS. 2003. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi*. Jakarta.
- Datu R. Indra Rindu, 2012. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999 – 2009* Makassar.
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Erlangga.
- Elita , 2007. *Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Rajawali
- Halim, Abdul. 2001. *Menejemen Keuangan Daerah*. UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometri Dasar* Terjemahan: Erlangga, Jakarta. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Pres, Jakarta.

- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999. 2002. *GBHN*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuncoro, 1995. *Otonomi daerah*. Fokusmedia, Jakarta.
- Mangkoesobroto, Guritno, 1994. *Ekonomi Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Suyanto dan Jawoto Nusantara. 2008. *Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan PAD di Kota Metro*. (diunduh dari <http://yantoumn.multiply.com/jurnal.pada.tahun.2009>).
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Putri, Febriani Irma, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Human Development Index (HDI) di Indonesia (Periode 1991-2008)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar: Skripsi.
- Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu, Puji Retno, 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*, Kediri.
- Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LPFE UI. Jakarta.
- Sucipto Wirosardjono, 1998. *Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa*, Prisma, No 3 Tahun XVII
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. ANDI. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987. *Pengeluaran Pemerintah*. Erlangga.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama, 2000.
- Sutrisno, 1984. *Konsep Pendapatan Asli Daerah*. Rajawali.
- Todaro, 1997. *Pertumbuhan ekonomi*. Jakarta

\_\_\_\_\_, 2000. *Economic Development. Seventh Edition*. New York.  
Addition Wesley Longman. Inc.

Widjaja, 2002. *Pendapatan asli daerah*. UI, Jakarta.

Yulianto Akri Eko, 2006. *Analisis Pengaruh PDRB Sektor-sektor Ekonomi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Kendari*. Universitas Hasanuddin, Makassar.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

### Lampiran 1

**Data Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di  
Luwu Raya 2009-2012**

TAHUN	KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	PENGELUARAN PEMERINTAH (Rp)	PENGELUARAN PEMERINTAH (t-1) (Rp)	JUMLAH TENAGA KERJA (Jiwa)
2009	LUWU	6,82	19.337.923.976,93	463.240.183.542,00	473.355.090.930,50	112.982
2010	LUWU	6,95	17.930.679.544,81	538.923.160.739,00	463.240.183.542,00	129.119
2011	LUWU	7,47	18.318.366.436,00	669.748.417.294,00	538.923.160.739,00	134.791
2012	LUWU	7,49	29.583.619.059,36	657.301.194.489,00	669.738.417.294,00	118.667
2009	LUWU UTARA	6,68	20.966.296.139,86	492.273.000.000,00	442.333.000.000,00	123.826
2010	LUWU UTARA	5,93	27.620.000.000,00	496.175.340.000,00	492.273.000.000,00	124.319
2011	LUWU UTARA	7,29	36.350.000.000,00	667.998.613.239,46	496.175.340.000,00	120.961
2012	LUWU UTARA	8,03	46.690.000.000,00	693.210.130.000,00	667.998.613.239,46	121.584
2009	LUWU TIMUR	-4,04	64.807.549.036,06	725.998.675.865,00	563.672.762.327,00	90.064
2010	LUWU TIMUR	15,39	59.143.942.602,28	516.006.469.440,00	725.998.675.865,00	105.898
2011	LUWU TIMUR	-5,33	64.107.149.333,16	579.555.754.672,00	516.006.469.440,00	103.754
2012	LUWU TIMUR	2,94	98.100.075.156,43	676.264.955.258,00	579.555.754.672,00	101.769
2009	PALOPO	7,86	21.473.395.000,00	386.056.041.480,00	359.254.921.921,51	55.906
2010	PALOPO	7,29	28.219.019.910,00	383.663.586.120,00	386.056.041.480,00	55.239
2011	PALOPO	8,16	35.703.421.000,00	498.403.458.036,54	383.663.586.120,00	58.139
2012	PALOPO	8,68	36.206.101.600,00	525.772.059.998,00	498.403.458.000,00	55.973

Sumber: Badan Pusat Statistik, DPPKAD kab/kota

## **Lampiran 2**

### **Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu 2009-2012**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>LUWU</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pertanian	57,08	56,63	56,15	56,21
Pertambangan/Penggalian	1,01	0,93	1,02	1,04
Industri Pengolahan	9,66	9,35	8,85	8,38
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,22	0,23	0,24	0,27
Bangunan	6,55	6,37	6,67	6,73
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,80	10,87	11,62	12,11
Angkutan dan Komunikasi	1,84	1,91	1,98	2,15
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,29	2,64	2,71	2,84
Jasa-Jasa	11,57	11,19	10,76	10,27

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

### **Lampiran 3**

#### **Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara 2009-2012**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>LUWU UTARA</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pertanian	66,03	65,63	64,90	64,02
Pertambangan/Penggalian	0,57	0,70	0,78	0,94
Industri Pengolahan	3,22	3,28	3,21	3,23
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,51	0,55	0,58	0,66
Bangunan	4,89	5,00	5,07	5,14
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,77	8,65	8,64	8,82
Angkutan dan Komunikasi	2,36	2,42	2,67	2,80
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,40	5,59	5,94	6,46
Jasa-Jasa	8,26	8,18	8,21	7,93

*Sumber: Badan Pusat Statistik*



#### **Lampiran 4**

##### **Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Luwu Timur 2009-2012**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>LUWU TIMUR</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pertanian	18,25	15,67	15,47	16,25
Pertambangan/Penggalian	70,88	73,31	73,56	71,63
Industri Pengolahan	2,32	1,99	1,90	1,97
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,24	0,22	0,22	0,25
Bangunan	0,51	0,49	0,45	0,55
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,89	1,66	1,62	1,80
Angkutan dan Komunikasi	1,27	1,14	1,12	1,25
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahanan	1,46	1,36	1,45	1,69
Jasa-Jasa	3,18	4,17	4,23	4,61

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

## **Lampiran 5**

### **Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Palopo 2009-2012**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>PALOPO</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pertanian	29,05	25,79	21,85	21,23
Pertambangan/Penggalian	0,16	0,16	0,15	0,15
Industri Pengolahan	4,32	4,21	4,13	4,01
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,69	1,57	1,70	1,68
Bangunan	10,12	10,36	11,22	24,53
Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,73	21,79	23,38	22,90
Angkutan dan Komunikasi	9,66	9,91	10,47	8,74
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	12,39	13,28	14,22	11,03
Jasa-Jasa	13,09	12,92	12,87	11,34

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

## Lampiran 6

### Hasil pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 untuk perhitungan statistik pengaruh $X_1$ , $X_{1(t-1)}$ dan $X_2$ terhadap $Y_1$

Dependent Variable: Y1?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 08/09/14 Time: 19:15  
 Sample: 2009 2012  
 Included observations: 4  
 Cross-sections included: 4  
 Total pool (balanced) observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-516.1520	275.6924	-1.872203	0.0940
X1?	-15.46469	6.521235	-2.371436	0.0418
X1t-1?	22.96582	6.957790	3.300734	0.0092
X2?	28.01103	17.61329	1.590335	0.1462
Fixed Effects				
(Cross)				
_LUWU--C	-6.325807			
_LUWUUTARA--C	-5.673645			
_LUWUTIMUR--C	-6.766578			
_PALOPO--C	18.76603			

#### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.710235	Mean dependent var	6.100625
Adjusted R-squared	0.517058	S.D. dependent var	4.869799
S.E. of regression	3.384220	Akaike info criterion	5.575760
Sum squared resid	103.0765	Schwarz criterion	5.913768
Log likelihood	-37.60608	Hannan-Quinn criter.	5.593069
F-statistic	3.676602	Durbin-Watson stat	3.783576
Prob(F-statistic)	0.039614		

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0

**Lampiran 7****Hasil Estimasi  $Y_1$  ( $\hat{Y}_1$ ) Berdasarkan Cross/Wilayah**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>TAHUN</b>	<b>CROSS/WILAYAH</b>
<b>LUWU</b>	<b>2009</b>	<b>521,5698281</b>
<b>LUWU</b>	<b>2010</b>	<b>522,4731718</b>
<b>LUWU</b>	<b>2011</b>	<b>523,7918215</b>
<b>LUWU</b>	<b>2012</b>	<b>525,5040126</b>
<b>LUWU UTARA</b>	<b>2009</b>	<b>522,2924162</b>
<b>LUWU UTARA</b>	<b>2010</b>	<b>524,7382736</b>
<b>LUWU UTARA</b>	<b>2011</b>	<b>519,554064</b>
<b>LUWU UTARA</b>	<b>2012</b>	<b>525,9540819</b>
<b>LUWU TUMUR</b>	<b>2009</b>	<b>511,8408851</b>
<b>LUWU TUMUR</b>	<b>2010</b>	<b>527,4695861</b>
<b>LUWU TUMUR</b>	<b>2011</b>	<b>517,259355</b>
<b>LUWU TUMUR</b>	<b>2012</b>	<b>516,9990118</b>
<b>PALOPO</b>	<b>2009</b>	<b>523,4386716</b>
<b>PALOPO</b>	<b>2010</b>	<b>524,8510033</b>
<b>PALOPO</b>	<b>2011</b>	<b>522,0952504</b>
<b>PALOPO</b>	<b>2012</b>	<b>526,2139037</b>

*Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0*

**Lampiran 8****Hasil pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 untuk  
perhitungan statistik pengaruh  $Y_1$  terhadap  $Y_2$** 

Dependent Variable: Y2?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 08/21/14 Time: 09:52  
 Sample: 2009 2012  
 Included observations: 4  
 Cross-sections included: 4  
 Total pool (balanced) observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.66104	11.18038	2.026857	0.0676
Y1?	0.003052	0.021408	0.142589	0.8892
Fixed Effects (Cross)				
_LUWU--C	-0.499320			
_LUWUUTARA--C	-0.085091			
_LUWUTIMUR--C	0.729325			
_PALOPO--C	-0.144913			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.785279	Mean dependent var	24.25521	
Adjusted R-squared	0.707199	S.D. dependent var	0.517108	
S.E. of regression	0.279813	Akaike info criterion	0.540917	
Sum squared resid	0.861249	Schwarz criterion	0.782351	
Log likelihood	0.672665	Hannan-Quinn criter.	0.553280	
F-statistic	10.05731	Durbin-Watson stat	1.123144	
Prob(F-statistic)	0.001125			

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0

**Lampiran 9****RIWAYAT HIDUP**

Sukmawan, Lahir tanggal 01 September 1992 di Palopo Sulawesi Selatan sebagai anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Syukur Pudaka dengan Andi Asmawati Adnan S.Pd.

Pendidikan Sekolah Dasar di jalani di SDN 55 Olang Kabupaten Luwu dan tamat tahun 2004, setelah itu melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 3 Palopo, tamat tahun 2007.

Lepas dari SMP Negeri 3 Palopo, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Palopo dan selesai pada tahun 2010.

Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi, dan menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) nya pada tahun 2014